



Sebuah kajian tentang evaluasi Program Indonesia Pintar bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Connie Chairunnisa¹, Istaryatiningtias¹

¹Administrasi Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Indonesia

*Penulis, e-mail: zusconnie@uhamka.ac.id

Abstract

This research aims to encourage the implementation and inequality that occurs in the distribution of the Smart Indonesia Program (PIP) for students with Special Needs (ABK) at SDN Sudimara Timur 2, Tangerang City, Banten. The method used is a qualitative method with an inequality evaluation research model (Discrepancy model). Data collection techniques through in-depth observation, interviews were conducted with 7 key people who were considered to understand PIP, namely the principal, treasurer, grade 2 teacher, grade 5 teacher, grade 6 teacher, PIP fund recipient operator and school committee, literature study, documentation study, and triangulation. The data analysis technique used by the Miles & Huberman interactive model is in the stages of data collection, data reduction, data presentation (data display) and drawing conclusions (verification). The first finding is that there are still obstacles in implementing the Smart Indonesia Program (PIP). Second, it is necessary to improve the quality of education and training for teachers to support the development of ABK in schools. Third, there is a need to increase coordination and communication between teachers, parents and medical personnel to support the development of ABK in schools. Fourth, it is necessary to provide outreach and education to students' parents about PIP so that there are no irregularities in the use of PIP funds. The recommendation that can be taken from this research is that the Smart Indonesia Program can be continued and improved, noting that there is a need to carry out a more comprehensive evaluation in the implementation of the Smart Indonesia Program for ABK in schools. This needs to be done to ensure that all crew members receive financial assistance from the Smart Indonesia Program.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dan ketimpangan yang terjadi dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SDN Sudimara Timur 2 Kota Tangerang, Banten. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan model penelitian evaluasi ketimpangan (*Discrepancy model*). Teknik pengumpulan data melalui observasi mendalam, wawancara dilakukan kepada 7 orang kunci yang dianggap memahami PIP yaitu kepala sekolah, bendahara, guru kelas 2, guru kelas 5, guru kelas 6, operator penerima dana PIP dan komite sekolah, studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan triangulasi. Model interaktif Miles & Huberman merupakan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini. Hasil temuan pertama, masih terdapat kendala dalam penerapan Program Indonesia Pintar (PIP). Kedua, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi guru dalam mendukung perkembangan ABK di sekolah. Ketiga, perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi antara guru, orang tua siswa dan tenaga medis dalam mendukung perkembangan ABK di sekolah. Keempat, perlu diadakan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua siswa tentang PIP agar tidak terjadi penyimpangan di dalam penggunaan dana PIP. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu bawa Program Indonesia Pintar perlu dilanjutkan dengan catatan perlu dilakukan evaluasi yang lebih komprehensif dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Program Indonesia Pintar; Evaluasi program; Anak berkebutuhan khusus

How to Cite: Chairunnisa, C., Istaryatiningtias. (2023). Evaluasi program Indonesia pintar bagi anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 12(2), 58-63. <https://doi.org/10.24036/jbmp.v12i2>



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2023 by author.

1. Pendahuluan

Memasukkan anak berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler dengan berbagai pendekatan pengajaran yang dilakukan oleh guru secara kolaboratif dengan berbagai metode penilaian merupakan tujuan dari konsep pendidikan inklusif (Rouse, 2006). Anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia sudah memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan, walaupun belum semua bisa menikmati bantuan

sepenuhnya dari pemerintah, hal ini bukan persoalan diskriminasi atau penyisihan, melainkan banyak faktor, termasuk faktor geografis dan juga sosial ekonomi (Amirin, 2013). Sekolah inklusi dianggap dapat memberikan berbagai manfaat, baik bagi Masyarakat umum maupun untuk anak luar biasa itu sendiri. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman sebayanya. Sekolah penyelenggara Pendidikan inklusi adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. (Baharun & Awwaliyah, 2018). Sekolah cenderung merespon dengan melakukan pemeliharaan sistem dan menjaga keseimbangan (equilibrium) dengan sistem lainnya. Dalam menjaga keseimbangan (equilibrium) sekolah harus melakukan adaptasi dengan lingkungan. Penelitian terkait mengenai pendidikan inklusi menyatakan bahwa pendidikan inklusi tetap saja dijalankan oleh sekolah melalui penyesuaian yang dilakukan dengan sumber daya yang dimiliki (Fernandes et al., 2021).

Kemiskinan menjadi penyebab hambatan sebagian masyarakat mendapatkan berbagai akses untuk kesejahteraan hidup, khususnya dibidang pendidikan (Zamjani, 2019). Penyelenggaraan sekolah inklusi juga menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar sekolah. Tantangan yang berasal dari dalam salah satunya adalah ketidaksiapan guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi. (Candra Pratiwi, 2013) dan perlakuan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus masih dimarjinalkan (Haryono, 2015). Sikap guru terhadap pendidikan lemah dalam asosiasi kerja dan efikasi diri memiliki hubungan yang rendah dengan sikap guru menuju inklusi (Saloviita, 2020). Hambatan terbesar terhadap pendidikan inklusi adalah sikap negatif masyarakat terhadapnya dan selain itu terdapat hambatan berupa hambatan fisik, ketidakmampuan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan berbagai macam peserta didik, dan kurangnya pelatihan yang memadai untuk guru (Van Mieghem et al., 2020). Faktor penghambat lainnya pada jenjang SD maupun jenjang di atasnya adalah keterbatasan dana dan tenaga pendidik yang ahli dibidangnya, terutama guru pendamping khusus yang masih dibayar sangat minim oleh sekolah. (Anjarsari, 2018). Berdasarkan hasil pengamatan awal sebelum penulis melakukan penelitian di lokasi penelitian penulis masih menemukan kurangnya pelayanan yang diberikan kepada ABK, terbukti dalam melayani anak berkebutuhan khusus, guru inklusi hanya ada satu orang, padahal idealnya guru inklusi berjumlah 2 (dua) orang.

Upaya dalam menyusun program pendidikan inklusif yang sesuai, tentunya menggunakan desain pembelajaran inklusif. Desain pembelajaran inklusif adalah rancangan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari analisis, pengembangan, implementasi, dan evaluasi sebagai prosedur sistematis yang lebih memperhatikan pemahaman, perubahan dan penerapan metode belajar (Sunanto & Hidayat, 2016). Perencanaan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus masih belum berjalan dengan baik, terutama dalam perencanaan program kekhususan bagi anak berkebutuhan khusus dan Pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus tidak dapat berjalan dengan efektif dikarenakan minimnya pengetahuan guru pembimbing khusus non-PLB tentang anak berkebutuhan khusus (Wardah, 2019). Pandangan mengenai perbedaan kualitas lulusan antara sekolah umum dan sekolah luar biasa perlu diatasi, selain itu anggapan bahwa kurang mampunya siswa ABK dalam mengikuti kurikulum yang diajarkan pada sekolah umum juga perlu dicarikan solusinya (Rizky, 2014). Sehingga sekolah inklusi menjadi solusi untuk menjebatani permasalahan tanpa mengurangi perhatian kebutuhan ABK itu sendiri (Chairunnisa, 2017). Penerapan model pengajaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi seharusnya disesuaikan dengan kondisi siswa agar adanya pengoptimalan kesempatan bagi seluruh siswa dalam mengembangkan potensi dirinya (Hanifah et al., 2022). Siswa berkebutuhan khusus memiliki keterampilan sosial rendah yang terlihat dengan interaksi lebih sedikit dengan teman sekelasnya, lebih banyak berinteraksi dengan guru, serta kurang dapat diterima oleh siswa reguler (Agustriyana & Nisa, 2017)

Salah satu program dalam mengatasi siswa yang rawan putus sekolah disebabkan karena kemiskinan dan berkebutuhan khusus adalah Program Indonesia pintar (PIP). Kendala yang ditemukan adalah belum tersalurkannya dana tersebut untuk siswa yang sangat membutuhkannya, seperti siswa kurang mampu dan siswa anak berkebutuhan khusus (ABK) (Septiana, 2018). Siswa yang berasal dari keluarga prasejahtera diberikan bantuan tunai bersyarat (BTB) melalui Program Indonesia Pintar (PIP) (Zamjani, 2019). Kajian serupa BTB seperti Program Indonesia Pintar telah banyak dibahas sejumlah kalangan (Cameron, 2009; Kharisma et al., 2017; Sparrow, 2007) yang mana program ini membantu menekan peningkatan angka putus sekolah di masa krisis. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2023 mengatakan bahwa Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan. Program Indonesia Pintar (PIP) adalah merupakan salah satu program jaminan sosial dibidang Pendidikan dalam rangka mengatasi masalah partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, khususnya untuk kalangan Masyarakat miskin, dan PIP merupakan bagian dari Upaya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai Pembukaan UUD 1945 (Retnaningsi, 2017). Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintahan pusat kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang di buktikan dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (Maya et al., 2019).

Meskipun telah terdapat beberapa kajian tentang PIP namun kajian lebih spesifik membahas tentang program ini dengan mengaitkannya pada pendidikan ABK masih tergolong sedikit. Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini (Analisa kesenjangan) dengan penelitian yang terdahulu bahwa penelitian ini membahas khusus ketimpangan yang terjadi penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar, kepada Anak Berkebutuhan Khusus yang termasuk dalam kategori keluarga miskin, sedangkan di dalam penelitian (Schneider et al., 2011) yang menganggap tidak diperlukan lagi bantuan yang lebih spesifik bagi ABK, dan juga berdasarkan penelitian (Life Haven Inc., 2014) penelitian di Zambia dan Filipina terbatas kepada skema Masyarakat miskin. Begitu pula penelitian (Retnaningsi, 2017) di kota Kupang dan Palembang hanya mengupas tentang Program Indonesia Pintar bagi siswa dari kalangan miskin, (Maya et al., 2019) penelitian implementasi Program Indonesia Pintar hanya terbatas kepada bantuan tunai bagi anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dan ketimpangan yang terjadi dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SDN Sudimara Timur 2 Kota Tangerang. Berdasarkan fenomena di lapangan serta kajian terdahulu terkait pendidikan inklusi penulis merasa tertarik untuk mengkaji topik ini, dengan harapan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengambil kebijakan seperti Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Sekolah hingga guru sebagai pihak terdepan dalam menyukseskan pelaksanaan program pendidikan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan model evaluasi ketimpangan (*Discrepancy Evaluation Model*) yang akan membandingkan antara kriteria dengan temuan di lapangan. Teknik pengumpulan data melalui observasi mendalam, Wawancara dilakukan kepada 7 orang kunci yang dianggap memahami Program Indonesia Pintar yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Guru kelas 2, Guru kelas 5, Guru kelas 6, Operator penerima dana PIP dan Komite sekolah, studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan triangulasi. Data Anak yang berkebutuhan khusus berjumlah 13 orang dengan berbagai jenis ketunaan (ADHD, Tuna Rungu, Tuna Grahita. Kesulitan belajar, Speech delay dan Autis). Jumlah siswa keseluruhan menurut kepala sekolah berjumlah 441 orang, sedangkan jumlah Guru hanya berjumlah 21 orang dengan rincian 15 orang guru kelas, 2 orang guru PAI, 1 orang guru Bahasa Inggris, 1 orang PJOK, 1 orang guru OPS dan 1 orang guru Inklusi.

Proses analisis data model Miles & Huberman dilakukan melalui tiga tahap yang jelas. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana semua data yang terkumpul dari berbagai sumber disatukan dan diseragamkan menjadi bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Data dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner diubah sesuai formatnya masing-masing. Langkah selanjutnya adalah *display data*, di mana data yang sudah diseragamkan dalam bentuk tulisan dan memiliki alur tema yang jelas, diolah ke dalam matriks kategorisasi sesuai dengan tema yang telah dikelompokkan dan dikategorisasi. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan/verifikasi, di mana dilakukan Analisis Matriks Evaluasi Ketimpangan. Proses ini membandingkan standar ketentuan pada Program Indonesia Pintar dengan ketimpangan yang ada serta membuat keputusan pada setiap tahap evaluasi. Tahapan ini merupakan langkah akhir dalam analisis data kualitatif Miles dan Huberman.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menjawab pertanyaan penelitian tentang penerapan program Indonesia Pintar untuk siswa ABK, peran Kepala Sekolah, peran Guru dan Orang Tua siswa ABK. Dari hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah dan guru menunjukkan kurang keseriusan dalam melaksanakan implementasi program Indonesia Pintar, terlihat masih banyak kendala dalam pelaksanaan dan pengelolaan proram Indonesia pintar seperti masih ada beberapa siswa melakukan penyalahgunaan dana PIP untuk hal-hal di luar kepentingan sekolah, berbeda dengan tujuan dari program ini adalah untuk mencegah putus sekolah. (Zamjani, 2019).

Gambaran secara umum dari analisis terhadap temuan kajian ini dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian pertama, masih terdapat kendala dalam penerapan PIP untuk siswa ABK di SDN Sudimara Timur-2 Tangerang dari analisis model ketimpangan terlihat bahwa sebanyak 13 siswa ABK tidak mendapatkan bantuan dari Program Indonesia Pintar ini. Diperlukan peran yang lebih efektif dari Pemerintah dalam memperhatikan kebutuhan siswa ABK dalam pelaksanaan PIP. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Kedua, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi guru dalam mendukung perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah. Guru perlu dilatih untuk dapat memberikan perhatian khusus dan mendukung kebutuhan siswa ABK dalam pembelajaran di kelas. Ketiga, perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi antara guru, orang tua siswa, dan tenaga medis dalam mendukung perkembangan ABK di sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim multidisiplin yang terdiri dari guru, orang tua siswa, tenaga medis dan ahli Pendidikan khusus. Keempat, perlu diadakan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua siswa tentang Proram Indonesia Pintar agar

tidak terjadi penyimpangan di dalam penggunaan dana PIP. Orang tua siswa perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme Proram Indonesia Pintar untuk menunjang kebutuhan ABK.

Program Indonesia Pintar belum sepenuhnya tepat sasaran, karena data yang menjadi acuan tidak di update setiap tahun nya sedangkan pendaftaran PIP dijamin setiap dua kali dalam setahun , hal ini yang mengakibatkan jumlah sasaran tidak persis dengan acuan, bahkan ABK tidak pernah mendapatkan dana PIP tersebut. Padahal dilihat dari Permendikbud Nomor 9 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 19 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknik Program Indonesia Pintar, menyatakan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) termasuk di antara kelompok yang berhak menerima bantuan dana yang bersumber dari PIP. Di berbagai penjuru dunia Anak Berkebutuhan Khusus menurut penelitian UNICEF, menjadi faktor terbesar menghambat partisipasi sekolah anak, dan lebih besar dari faktor lain seperti jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan kondisi Geografis. (Mizunoya et al., 2016)

Kesadaran orang tua siswa rendah, hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Guru dan Kepala sekolah SDN Sudimara Timur-2 bahwa para orang tua siswa tidak pernah melapor ke sekolah bila proses pencairan dan PIP diterima, walaupun banyak orang tua yang hadir pada saat pendaftaran untuk usulan PIP. Kepala Sekolah kurang bisa berperan aktif pada proses pengusulan Program Indonesia Pintar (PIP), hal ini disebabkan usulan bantuan dana dari Pemerintah Pusat ini diusulkan melalui pemangku kepentingan (Anggota Dewan, Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan di Walikota maupun di tingkat Kecamatan & Kelurahan). Hasil kajian dari penelitian ini adalah tidak ada peningkatan dari segi akademik oleh peserta didik penerima PIP. Sedangkan penelitian lain mengatakan yang sama, bahwa terdapat intervensi dari elit politik setempat (Retnaningsi, 2017).

Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia masih mendapatkan kesempatan Pendidikan, walaupun tidak semua dapat menikmati pendidikan tersebut. (Hamidaturrohmah & Mulyani, 2020); (Lestari, 2017), (Rudiyati, 2013) , hal ini bukan semata-mata masalah diskriminasi atau disisihkan , akan tetapi banyak faktor termasuk masalah geografi dan sosial ekonomi. (Agustriyana & Nisa, 2017); (Amirin, 2013). Dari segi sosial ekonomi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah kelompok yang paling rentan terhadap kemiskinan, dan faktor kemiskinan ini sangat dekat dengan menciptakan generasi ABK baru, sehingga program Indonesia Pintar ini perlu secara terencana terencana memasukkan keluarga penyandang ABK ini sebagai yang utama dalam target dan penanggulangan yang spesifik. (Zamjani, 2019). Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, implementasi nya di SDN Sudimara Timur-2 Tangerang menyatakan terdapat ketimpangan di dalam penyaluran dana PIP untuk siswa ABK berjumlah 13 orang tidak pernah tersentuh untuk diusulkan, padahal selain dari keluarga tidak mampu ada satu orang siswa yang penglihatannya hampir buta, tapi kurang kepedulian orang tua dan kepala sekolah untuk membawanya ke Puskesmas, sehingga rawan putus sekolah dan harapan masa depan suram, dan sebaliknya ada beberapa siswa yang mendapatkan dana bantuan PIP, walaupun tidak memerlukannya.

Upaya Pemerintah dalam rangka memperluas jangkauan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus karena menurut data dari Pusat Data dan statistik Pendidikan dan Kebudayaan/ PDSPK SLB di Indonesia masih terbatas jumlahnya yaitu sekitar 2070 sekolah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), Pemerintah mendorong pendirian sekolah regular inklusi, namun sebagian besar sekolah tersebut tidak memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK), seperti di SDN Sudimara Timur-2 hanya memiliki GPK satu orang dengan jadwal yang padat untuk melayani 13 Anak Berkebutuhan Khusus. Jangkauan PIP juga baru 14 % dari total jumlah ABK di seluruh Indonesia (Zamjani, 2019)

Rendahnya pengawasan yang dilakukan berbagai pihak, baik dari Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah, serta rendahnya kesadaran orang tua peserta didik, membuat implementasi Program Indonesia Pintar tidak sesuai dengan tujuan. Karena pada umum nya Anak Berkebutuhan Khusus adalah berasal dari keluarga miskin, biasanya mereka telah tercover di dalam berbagai program bantuan tunai bersyarat yang di salurkan oleh Pemerintah. Sehingga beberapa negara menganggap tidak diperlukan lagi program bantuan yang lebih spesifik bagi ABK, apabila mereka memberikan bantuan kepada ABK, seperti di Zambia dan Filipina mereka memisahkan skemanya. (Life Haven Inc., 2014) Dan juga terjadi di Uganda dan Afrika Selatan. (Schneider et al., 2011)

4. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini masih adanya kendala dalam penerapan Program Indonesia Pintar (PIP), sehingga diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi guru dalam mendukung PIP untuk perkembangan ABK di sekolah. Selain itu juga perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi antara guru, orang tua siswa dan tenaga medis dalam mendukung perkembangan ABK di sekolah. Perlu juga diadakan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua siswa tentang PIP agar tidak terjadi penyimpangan di dalam penggunaan dana PIP. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) perlu

dilanjutkan dan ditingkatkan dengan menekankan perlunya evaluasi yang lebih komprehensif dalam penerapan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di lingkungan sekolah. Evaluasi yang lebih menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh ABK memperoleh manfaat dana dari Program Indonesia Pintar (PIP).

Daftar Rujukan

- Agustriyana, N. A., & Nisa, A. T. (2017). Perbedaan Keterampilan Sosial Siswa Berkebutuhan Khusus Dan Tidak Berkebutuhan Khusus (Siswa Normal) Di Sekolah Inklusi. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman*, 3(1), 12–16.
- Amirin, T. M. (2013). Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 1(1).
- Anjarsari, A. D. (2018). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Jenjang Sd, Smp, Dan Sma Di Kabupaten Sidoarjo. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 1(2), 91. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v1n2.p91-104>
- Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2018). Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 5(1), 57–71.
- Cameron, L. (2009). Can a public scholarship program successfully reduce school drop-outs in a time of economic crisis? Evidence from Indonesia. *Economics of Education Review*, 28(3), 308–317.
- Candra Pratiwi, J. (2013). Sekolah Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus : Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepannya. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan “Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi,” November*, 237–242.
- Chairunnisa, C. (2017). Challenge for school management inclusive in Indonesia through education strategy. *International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences*, 4(4), 436–440.
- Fernandes, P. R. da S., Jardim, J., & Lopes, M. C. de S. (2021). The soft skills of special education teachers: Evidence from the literature. *Education Sciences*, 11(3).
- Hamidaturrohmah, H., & Mulyani, T. (2020). Strategi Pembelajaran Jarak Jauh Siswa Berkebutuhan Khusus Di Sd Inklusi Era Pandemi Covid-19. *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal*, 8(2), 247.
- Hanifah, D. S., Haer, A. B., Widuri, S., & Santoso, M. B. (2022). Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Dalam Menjalani Pendidikan Inklusi Di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 473.
- Haryono. (2015). Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Unnes*, 32(2), 124205.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Ikhtisar Data Pendidikan dan Kebudayaan. *Ikhtisar Data Pendidikan & Kebudayaan*, 1–52.
- Kharisma, B., Satriawan, E., & Arsyad, L. (2017). The impact of social safety net scholarships program to school dropout rates in Indonesia: The intention-to-treat analysis. *The Journal of Developing Areas*, 51(4), 303–316.
- Lestari, F. (2017). Metode Guru Bk Dalam Mengatasi Problem Penyesuaian Diri Pada Anak Berkebutuhan Khusus. *Inklusi*, 2(2), 273.
- Life Haven Inc. (2014). *Disability and the World Bank Safeguards - Case Study on The Conditional Cash Transfer Program in the Philippines: The Case of Poor Households with Persons with Disabilities*. 1–16.
- Maya, sri ismayanti, Yus, D., Syaefudin, & Didik, K. (2019). Implementasi program indonesia pintar (PIP). *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 4(1), 38–45.
- Mizunoya, S., Yamasaki, I., & Mitra, S. (2016). The disability gap in employment rates in a developing country context: New evidence from Vietnam. *Economics Bulletin*, 36(2), 771–777.
- Retnaningsi, H. (2017). Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi Di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera

- Selatan. *Aspirasi*, 8(2), 177.
- Rizky, U. F. (2014). Identifikasi Kebutuhan Siswa Penyandang Disabilitas Pasca Sekolah Menengah Atas. *Indonesian Journal Od Disability Studies*, 1(1), 52–59.
- Rudiyati, S. (Universitas N. Y. (2013). *With Special Educational Needs in Inclusive Schools*. 296–306.
- Saloviita, T. (2020). Teacher attitudes towards the inclusion of students with support needs. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 20(1), 64–73.
- Schneider, M., Waliuya, W., Barrett, S., Musanje, J., & Swartz, L. (2011). “Because I am Disabled I Should Get a Grant”: Including Disability in Social Protection Programmes. *International Conference: “Social Protection for Social Justice,” April*.
- Septiana, F. I. (2018). *Peran Guru Dalam Standar Proses Pendidikan Khusus Pada Lingkup Pendidikan Formal*. III(01), 131–139.
- Sparrow, R. (2007). Protecting education for the poor in times of crisis: An evaluation of a scholarship programme in Indonesia. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 69(1), 99–122.
- Sunanto, J., & Hidayat. (2016). Desain Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Kelas Inklusif. *Jurnal Asesment Dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus (Jassi Anakku)*, 17(1), 47–55.
- Van Mieghem, A., Verschueren, K., Petry, K., & Struyf, E. (2020). An analysis of research on inclusive education: a systematic search and meta review. *International Journal of Inclusive Education*, 24(6), 675–689.
- Wardah, E. Y. (2019). Peranan Guru Pembimbing Khusus Lulusan Non-Pendidikan Luar Biasa (Plb) Terhadap Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi Kabupaten Lumajang. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 2(2), 93.
- Zamjani, I. (2019). Inklusivitas Program Indonesia Pintar : Studi Kasus Pelaksanaannya Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Lima Daerah Analyzing the Inclusiveness of Smart Indonesia Program : a Case Study of Its Implementation for Special Needs Children in Five Districts. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4, 15–32.